



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau sub kegiatan, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
- (3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

- (2) Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;

Q

- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024

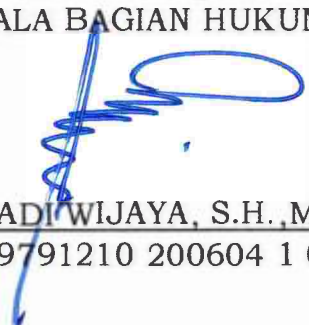
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

7. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Permen PUPR 07 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 20 Tahun 2024 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;

34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65); dan
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 12.313.875.750,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 6.370.620.396, - atau 51,74 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II belum maksimal dikarenakan :

1. Kegiatan fisik konstruksi masih dalam proses pelaksanaan, yaitu pemeliharaan dan pembangunan jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan penyusunan data dan kajian – kajian dalam proses penyusunan laporan pendahuluan.

Tabel. 2.1.

TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			127.739.830.739		14.096.387.885		12.313.875.750		4.112.532.399		2.258.087.997		6.370.620.396		20.467.008.281		16,02	
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,57 indeks		A 86,30		84,25 indeks		A 86,30		A 86,30		A 86,30		A 86,30		102,05		
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,57 indeks		A 86,30		84,25 indeks		A 86,30		A 86,30		A 86,30		A 86,30		102,05		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B 84,45 Indeks	21.172.133.420	85,73	4.486.252.715	84,25 indeks	4.885.388.371	87,37 Indeks	851.904.869	88.15 Indeks	1.607.240.659	88.15 Indeks	2.459.145.528	88.15 Indeks	6.945.398.243	104,38	32,8	DPRKP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	132.975.080	100 %	34.887.200	100%	8.145.000	31,48	0	15.02	1.325.000,00	46.50	1.325.000,00	100 %	36.212.200	100 %	27,23	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	44.337.540	30	12.486.000	15 Dokumen	3.375.500	3	0	0	1.325.000	3	1.325.000	33	13.811.000	55	31,15	DPRKP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	88.637.540	24	22.401.200	12 Laporan	4.769.500	5	0	3.75	0	9.25	0	33,25	22.401.200	69,27	25,27	DPRKP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	14.908.561.010	100 %	3.186.758.710	100%	3.425.254.318	30,43	608.288.374	37,01	1.165.251.817	67.44	1.773.540.191	67.44	4.960.298.901	67.44	33,27	DPRKP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	14.877.701.910	25 Orang/bulan	3.179.958.710	25 Orang/bulan	3.422.204.318	24	608.288.374	25 Orang/bulan	1.165.251.817	24	1.773.540.191	24	4.953.498.901	92,31	33,29	DPRKP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	28 Laporan	30.859.100	14	6.800.000	7 Laporan	3.050.000	2.5	0	2,69	0	5.19	0	19,19	6.800.000	68,54	22,04	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	44 0.6 61.77 3	100 %	98.5 15.0 00	100%	108.546.800	36,75	3.375.000	37.25	50.9 70.0 00	74	54.345.000	74	152.860.000	74	34,69	DPRKP
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	31 9.0 68.75 0	2	76.4 10.0 00	2 Paket	69.7 55.0 00	1	0	0.5	32.5 00.0 00	1.5	32.500.000	3,5	108.910.000	43,75	34,13	DPRKP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	12 1.5 93.02 3	49	22.1 05.0 00	50 Orang	38.7 91.8 00	47	3.375.000	49	18.4 70.0 00	49	21.845.000	98	43.9 50.0 00	49	36,15	DPRKP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.4 13.19 4.9 96	100 %	310.438.613	100%	342.343.700	39,52	76.040.946	0.41	115.817.380	39,93	191.858.326	39,93	502.296.939	39,93	35,54	DPRKP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.45 6.5 33	1	8.67 0.00 0	1 Paket	8.68 9.10 0	0.5	4.423.000	0	0	0.5	4.423.000,	1,5	13.0 93.0 00	37,5	30,84	DPRKP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	98.58 5.7 93	3	24.0 67.3 00	3 Paket	21.7 09.2 00	1.5	20.680.300	0	0	1.5	20.680.300	4,5	44.7 47.6 00	37,5	45,39	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	62.780.280	4	13.045.100	4 Paket	13.289.300	2	0	0	6.291.000	2	6.291.000	6	19.336.100	37,5	30,8	DPRKP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	220.082.500	30	53.000.000	30 Paket	49.025.000	8	6.713.500	11	29.290.500	19	36.004.000	49	89.004.000	40,83	40,44	DPRKP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	84.300.905	1	20.024.500	1 Paket	19.582.400	0.5	8.100.000	0	9.585.000	0.5	17.685.000	1,5	37.709.500	37,5	44,73	DPRKP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	830.323.285	86	188.331.713	40 Laporan	199.923.000	12	36.124.146	17	43.700.880	29	79.825.026	115	268.156.739	71,88	32,29	DPRKP
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	66.625.700	NA	-	5 Dokumen	30.125.700	1	0	2	26.950.000,	3	26.950.000	3	26.950.000	15	40,45	DPRKP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	89 %	175.636.249	85	40.850.000	87%	26.356.098	87 %	0	0	26.300.000	87 %	26.300.000	87	67.150.000	97,75	38,23	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	155.63 6.249	2	40.850.000	2 Unit	26.356.098	2	0	0	26.300.000	2	26.300.000,	4	67.150.000	36,36	43,15	DPRKP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	3.132.571.905	100 %	650.621.477	100%	26.356.098	25	128.632.736	47.75	232.850.837	72.75	361.483.573	72,75	1.012.105.050	72,75	32,31	DPRKP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan	202.383.871	24	45.379.185	24 Laporan	73.182.055	6	13.040.038	9	12.055.065	15	25.095.103	39	70.474.288	29,55	34,82	DPRKP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1105 Laporan	2.930.188.034	247	605.242.292	264 Laporan	739.794.000	66	115.592.698	88	220.795.772	154	336.388.470	401	941.630.762	36,29	32,14	DPRKP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	968.532.407	100 %	164.181.715	100%	161.766.400	25	35.567.813	25	14.725.625	50	50.293.438,	50	214.475.153	50	22,15	DPRKP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	551.833.673	10 Unit	117.978.115	10 Unit	131.681.400	1	23.052.813	3	14.725.625	4	37.778.438	4	155.756.553	40	28,23	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	12 8.0 91. 48 8	81	36.2 43.6 00	25 Unit	30.0 85.0 00	10	12.515 .000	0	0	10	12.515.0 00	91	48.7 58.6 00	63,18	38,07	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													40,00	34,13					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													64,37	49,06					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya Manusia kurang, sehingga harus merangkap jabatan / melaksanakan tugas di luar tupoksi																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sumber Daya Manusia kurang, sehingga harus merangkap jabatan / melaksanakan tugas di luar tupoksi																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pekerjaan dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada																			
	Tujuan : Meningkatnya akses rumah layak huni		Rasio Rumah Layak Huni	0,255 Rasio		0,251		0,251		0,251		0,251		0,251		0,251		98,43		DPRKP
	Sasaran : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar		Persentase rumah layak huni	98.79 %		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		99,33		DPRKP
2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	10. 73 5.5 31. 20 0	100	921. 867. 025	100%	874. 458. 679	100	153.57 5.894	100	220. 389. 638	100	373.965. 532	100	1.29 5.83 2.55 7	100	12,07	DPRKP
			Persentase tingkat hunian Rusunawa	95		95		95%		95		95		95		95		100		DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>	90	945.4575	75	17.222.800	80%	61.974.800	75	3.388.800	2.35	0	77.35	3.388.800	77,35	20.611.600	85,94	2,18	DPRKP
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	255.337.500	1	17.222.800	1 Dokumen	61.974.800	0.25	3.388.800	0.47	0	0.72	3.388.800	1,72	20.611.600	86	8,07	DPRKP
		<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kab/kota yang mendapatkan sosialisasi</i>	100 %	945.097.850	100 %	28.696.000	100%	21.865.000	100 %	0	-	0	100	0	100	28.696.000	100	-	DPRKP
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	400 Orang	323.352.959	200	28.696.000	50 Orang	21.865.000	1	0	0	0	0	0	200	28.696.000	50	-	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	82,73 %	11.411 .09 9.9 40	53,91	3.20 1.86 0.30 0	20,11%	3058 4788 00	20,11 %	2.689. 927.50 0	-	83.4 82.0 00	20,11%	2.773.40 9.500	74,02	5.97 5.26 9.80 0	89,47	52,36	DPRKP
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	4,12		2,68		1,03%		1,03%		-		1,03%		3,71		90,05		DPRKP
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	100 %	11.411 .09 9.9 40	NA	3.20 1.86 0.30 0	95%	3058 4788 00	48,61	2.689. 927.50 0		83.4 82.0 00	48,61	2.773.40 9.500	48,61	5.97 5.26 9.80 0	48,61	52,36	DPRKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	432 Unit	11.411 .09 9.9 40	391	3.20 1.86 0.30 0	108 Unit Rumah	3058 4788 00	149	2.689. 927.50 0		83.4 82.0 00	149	2.773.40 9.500	540	5.97 5.26 9.80 0	125	52,36	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													137,96	135,08					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													51,17	135,08					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Database Rumah Tidak Layak Huni terhimpun dan terkelola dengan baik																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Data bersifat dinamis serta fluktuasi kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swaday																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dilakukan sosialisasi kepada calon penerima RTLH untuk dapat mewujudkan peningkatan RTLH																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sosialisasi kepada penerima dilakukan secara kontinyu; Optimalisasi Database																			
	Tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85.64 %		76,56		78,19		76,56		76,56		76,56		78,19		91,30		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89.89 %		77,13		79.26		77,13		77,13		77,13		79.26		88,17		
4		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	72 %	52.973 .33 8.7 99	78,09	2.96 5.30 4.51 2	69,4%	2.10 0.35 4.90 0	78,09	356.41 6.736	78,09	204.388. 700,	78,09	560.805. 436	78,09	3.52 6.10 9.94 8	108,4 6	6,66	DPRKP
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	75,66 %		76,17		69,4%		76,17		76,17		76,17		76,17		100,6 7		
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	52,23 %		2,09		13,09%		12,09		12,09		12,09						

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	32 Dokumen	1.833.971.089	4	139.007.000	5 dokumen	130.000.000	0.53	5.945.000,	1.47	3.950.000	2	9.895.000	6	148.902.000	18,75	8,12	DPRKP
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8 Laporan	198.603.189	2	35.070.000	2 Laporan	30.000.000	0.5	5.945.000	1.5	3.125.000,	2	9.070.000	4	44.140.000	50	22,23	DPRKP
		Penyusunan/Reviu/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereviu/Terlegalisasi	12 Dokumen	1.142.897.400	1	98.637.000	1 Dokumen	90.000.000	-	-	0.09	825.000	0.09	825.000	1,09	99.462.000	9,08	8,70	DPRKP
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 Kelompok Masyarakat	113.021.900	2	5.300.000	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000	-	-	-	-	-	-	2	5.300.000	33,33	4,68	DPRKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	140.663 meter	51.140.367.710	183969,3	2.826.297.512	130.663 meter	1.970.354.900	183.969,30	350.471.736	183.969,30	200.438.700	183.969,30	550.910.436	183.969,30	3.377.207.948	130,79	6,6	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	85.663 meter		10424 5,4		73.663 meter		104.2 45,40		104.2 45,40		104.245 ,40		104.245 ,40		121,6 9		DPRKP
			Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	910		110		318 unit		187		-		187		187		20,55		DPRKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	770 unit	13.175 .41 1.6 85	110	1.74 8.97 9.20 0	20 Unit Rumah	426.305. 000	19	299.98 0.000		12.3 85.0 00	19	312.365. 000	129	2.06 1.34 4.20 0	16,75	15,65	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	16 Laporan	533 .26 3.5 00	2	86.7 30.9 00	4 Laporan	421. 839. 500	0,99	41.483 .736	0,69	85.3 44.0 00	1,68	126.827. 736	3,68	213. 558. 636	23	40,05	DPRKP
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4 Do ku me n	152 .88 1.2 70	1	14.1 04.1 00	1 Dokume n	25.0 00.0 00	0,24	-	0,24	2.00 0.00 0	0,48	2.000.00 0	1,48	16.1 04.1 00	37	10,53	DPRKP
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	68 Ha	34. 945 .31 0.7 28	8,54	976. 483. 312	4,5 Ha	1.09 7.21 0.40 0		9.008. 000	1,53	100. 709. 700	1,53	109.717. 700	10,07	1.08 6.20 1.01 2	14,81	3,11	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													47,67	26,05					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													70.603	19,95					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan jadwal																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses administrasi agak lambat																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan penyerapan anggaran																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Percepatan penyelesaian administrasi untuk proses penyerapan anggaran																			
5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70 %	8.015.095.963	87	2.521.103.333	66%	1.395.195.000	64	59.647.400	70	142.587.500	70	202.234.900	70	2.723.338.233	100	33,98	
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70		86		66%		66		70		70		70		100		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	24123 meter	8.015.095.963	28134,82	2.521.103.333	22123 meter	1.395.195.000	28.134,	59.647.400	-	142.587.500	28.134	202.234.900	28134,82	2.723.338.233	116,63	33,98	DPRKP
			Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	21475 meter		15922,63		17475 meter		15.922,				15.922		15922,63			74,14	DPRKP
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16	7.538.680.100	9	2.385.095.433	4 Lokasi	1.390.425.000	-	59.647.400,0	0,82	141.792.500,00	0,82	201.439.900	9,82	2.586.535.333	61,38	34,31	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	476.415.863	12	136.007.900	4 Laporan	4.770.000	1	-	1	795.000	2	795.000	14	136.802.900	87,5	28,72	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													35,25	21,08					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													109,14	25,43					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Penyerahan PSU Perumahan dari pengembang menjadi aset Pemerintah Kota Blitar; - Perencanaan peningkatan peningkatan PSU Perumahan telah dilakukan dengan baik; - Penyerahan aset PSU memiliki konsekuensi kewenangan pemeliharaan oleh Pemerintah Kota																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Penyerahan aset PSU Perumahan pada sebagian perumahan belum terealisasi karena pengembang belum memproses penyerahan PSU sebagaimana ketentuan yang berlaku; - Beban PSU yang harus dipelihara / ditangani bertambah																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang untuk segera melaksanakan mekanisme penyerahan PSU Perumahan; - Prioritasi penanganan PSU Perumahan																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Koordinasi intensif dengan pengembang dimaksud untuk segera melaksanakan mekanisme penyerahan PSU Perumahan; - Penyusunan prioritas penanganan PSU Perumahan																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)													95,89	28,80					
	Predikat kinerja(%)																			

Untuk pencapaian target kinerja maka Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dapat disajikan dalam penjelasan berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akses rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Peningkatan akses rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	1. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman
			2. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	1. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman
			2. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Perubahan Renja Tahun 2024 dapat disajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	0,251	0,251
1.1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	97,61	98,59
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	78,19	78,19
2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	79,26	79,26
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	84,53	86,30
3.1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	84,53	86,30

Selain berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Dinas, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 pada Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Rumah Layak Huni sesuai Standar	- o Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - o Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program - o Penyusunan Studi Kelayakan Penambahan Unit Rusunawa	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2	Meningkatkan kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	- o Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman - o Pelatihan dan Tenaga Ahli pengoperasian GIS, Revisi Peta Deliniasi Kumuh	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
3	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	- o Melakukan review target kinerja dalam perubahan renstra - o Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi realisasi capaian kinerja dan apel pagi - o Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan strategi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan, terdapat 20 sub kegiatan (62,5%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 12 sub kegiatan (37,5%) mengalami perubahan (5 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 7 sub kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja			
		Tetap	Berkurang	Bertambah	Jumlah
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	20	5	7	32

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 5 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 7 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Pompa Air)
3. Penyusunan Studi Kelayakan Penambahan Unit Rusunawa
4. Sosialisasi Rencana Pembangunan Penambahan Unit Rusunawa
5. Pembersihan Lokasi Pembangunan tower baru Rusunawa
6. Pelatihan dan Tenaga Ahli pengoperasian GIS, Revisi Peta Deliniasi Kumuh
7. Fasilitasi sayan Seruni

Adapun kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini:

Tabel. 3.4. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 yang mengalami perubahan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	3.422.204.318	3.422.436.116	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	30.125.700	26.950.000	Efisiensi
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	26.356.098	29.300.000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Pompa Air)
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	2 Dokumen	61.974.800	121.974.800	Penyusunan Studi Kelayakan Penambahan Unit Rusunawa

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	100 Orang	21.865.000	47.481.800	Sosialisasi Rencana Pembangunan Penambahan Unit Rusunawa
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	715.911.529	733.911.529	Pembersihan Lokasi Pembangunan tower baru Rusunawa
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	89.500.000	Efisiensi
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	4 Laporan	421.839.500	419.732.500	Efisiensi
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	46.382.550	Pelatihan dan Tenaga Ahli pengoperasian GIS, Revisi Peta Deliniasi Kumuh

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan	
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan	4,5 Ha	4,5 Ha	1.097.210.400	977.840.129	Efisiensi	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	108 Unit Rumah	108 Unit Rumah	3.058.478.800	3.064.942.000	Fasilitasi Sayan Seruni	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	4 Lokasi	1.390.425.000	1.380.939.602	Efisiensi	

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					10.381.735.750	12.313.875.750	12.313.875.631						24.461.611.084		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.381.735.750	12.313.875.750	12.313.875.631						24.461.611.084		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.381.735.750	12.313.875.750	12.313.875.631						24.461.611.084		
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,25 indeks	85,73 indeks	4.863.497.471	4.885.388.371	4.885.388.371						85,73 indeks	5.512.035.393	DPRK P
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	18.145.000	8.145.000	8.145.000						100 %	60.045.750	DPRK P
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 Dokumen	15 Dokumen	3.375.500	3.375.500	3.375.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPKota Blitar	15 Dokumen	17.306.250	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Lapora n	12 Lapora n	14.769.500	4.769.500	4.769.500	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	12 Lapora n	42.739.5 00	DPRK P
	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	3.425.254.318	3.425.254 .318	3.425.486 .116						100 %	3.796.29 9.302	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	3.422.204.318	3.422.204 .318	3.422.436 .116	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Alok asi Umu m	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	25 Orang/ bulan	3.716.38 2.202	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		7 Lapora n	7 Lapora n	3.050.000	3.050.000	3.050.000	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	7 Lapora n	79.917.1 00	DPRK P
	1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	108.546.800	108.546.8 00	108.546.8 00						7 Lapora n	115.805. 600,	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	2 Paket	69.755.000	69.755.00 0	69.755.00 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	2 Paket	83.187.5 00	DPRK P

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0 4	0 1	2. 05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		50 Orang	50 Orang	38.791.800	38.791.80 0	38.791.80 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	50 Orang	32.618.1 00	DPRK P
	1	0 4	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	322.423.800	342.343.7 00	339.168.0 00						100 %	520.927. 651	DPRK P
	1	0 4	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	8.689.100	8.689.100	8.689.100	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	1 Paket	11.239.1 00	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a		Prioritas				
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024				Nasion al	Daera h		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	21.709.200	21.709.20 0	21.709.20 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	3 Paket	130.771. 251	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	13.289.300	13.289.30 0	13.289.30 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	4 Paket	16.346.1 00	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	30 Paket	49.025.000	49.025.00 0	49.025.00 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	30 Paket	88.445.4 00	DPRK P

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a		Prioritas				
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024				Nasion al	Daera h		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0 4	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	19.582.400	19.582.40 0	19.582.40 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	1 Paket	19.995.5 00	DPRK P
	1	0 4	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Lapora n	40 Lapora n	199.923.000	199.923.0 00	199.923.0 00	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	40 Lapora n	243.130. 300	DPRK P
	1	0 4	0 1	2. 06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5 Dokum en	5 Dokum en	10.205.800	30.125.70 0	26.950.00 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	5 Dokum en	11.000.0 00	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al					Daera h
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-	87 %	87 %	26.356.098	26.356.09 8	29.300.00 0						88 %	50.000.0 00	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	3 Unit	26.356.098	26.356.09 8	29.300.00 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	2 Unit	50.000.0 00	DPRK P
	1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	790.913.055	812.976.0 55	812.976.0 55						100 %	825.893. 360	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Lapora n	24 Lapora n	51.119.055	73.182.05 5	73.182.05 5	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	36 Lapora n	44.452.7 00	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al					Daera h
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		264 Lapora n	264 Lapora n	739.794.000	739.794.0 00	739.794.0 00	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	264 Lapora n	781.440. 660	DPRK P
	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	171.858.400	161.766.4 00	161.766.4 00						100 %	143.063. 730	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	10 Unit	141.773.400	131.681.4 00	131.681.4 00	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	10 Unit	126.920. 530	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al					Daera h
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	25 Unit	30.085.000	30.085.00 0	30.085.00 0	Kota Blitar	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	25 Unit	16.143.2 00	DPRK P
2	1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tingkat hunian Rusunawa Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		95 % 100 %	95 % 100 %	794.458.679	874.458.6 79	978.075.4 79						95 % 100 %	1.150.94 3.042	DPRK P
	1	0	0	2.		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	-	80 %	80 %	61.974.800	61.974.80 0	121.974.8 00						85 %	40.516.8 75	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas						
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1	0	0	2	00	08	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi		1 Dokum en	2 Dokum en	61.974.800	61.974.800	121.974.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	1	40.516.875	DPRK P
	1	0	0	2	02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	-	100 %	100 %	21.865.000	21.865.000	47.481.800					100 %	82.093.125	DPRK P	
	1	0	0	2	00	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota		50 Orang	100 Orang	21.865.000	21.865.000	47.481.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	100 Orang	82.093.125	DPRK P
	1	0	0	2	03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	-	100 %	100 %	74.707.350	74.707.350	74.707.350					100 %	190.741.200	DPRK P	

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	74.707.350	74.707.350	74.707.350	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	10	190.741. 200	DPRK P
	1	0	0	2.		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	-	80,77 Indeks	86,26 Indeks	635.911.529	715.911.529	733.911.529						86,26 Indeks	837.591. 842	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1 Dokum en	1 Dokum en	635.911.529	715.911.529	733.911.529	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Warga Rusuna wa	1 Dokum en	837.591. 842	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		13,09 69,15 69,4 % %	13,09 76,17 78,09 % %	1.875.359.500	2.100.354 .900	1.999.760 .179						13,537 6,17 78,09 % % %	12.889.7 26.014	DPRK P
	1	0 4	0 3	2. 02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	-	5 dokum en	5 dokum en	115.000.000	130.000.0 00	129.500.0 00			Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	5 dokum en	468.861. 314	DPRK P
	1	0 4	0 3	2. 02	00 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		2 Lapora n	2 Lapora n	30.000.000	30.000.00 0	30.000.00 0	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	2 Lapora n	50.855.3 14	DPRK P

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi		1 Dokum en	1 Dokum en	75.000.000	90.000.00 0	89.500.00 0	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	1 Dokum en	380.663. 700	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		2 Kelomp ok Masyar akat	2 Kelomp ok Masyar akat	10.000.000	10.000.00 0	10.000.00 0	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	2 Kelomp ok Masyar akat	37.342.3 00	DPRK P
	1	0	0	2.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	-	318 unit 73.663 meter 130.66 3 meter	318 unit 73.663 meter 130.66 3 meter	1.760.359.500	1.970.354 .900	1.870.260 .179						458 unit 79.663 meter 135.66 3 meter	12.420.8 64.700	DPRK P

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sum ber Dan a	Prioritas				
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024				Nasion al		Daera h	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		20 Unit Rumah	19 Unit Rumah	426.305.000	426.305.0 00	426.305.0 00	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Inse ntif Fisk al	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	140 Unit Rumah	3.209.69 4.000	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perema jaan Permukiman Kumuh		4 Lapora n	4 Lapora n	259.046.900	421.839.5 00	419.732.5 00	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	4 Lapora n	139.032. 300	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokum en	1 Dokum en	25.000.000	25.000.00 0	46.382.55 0	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	1 Dokum en	152.880. 270	DPRK P

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
										Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al		Daera h	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		4,5 Ha	4,5 Ha	1.050.007.600	1.097.210 .400	977.840.1 29	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	17 Ha	8.919.25 8.130	
4	1	0	0				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		1,03 20,11 % %	1,03 20,11 % %	2.053.225.100	3.058.478 .800	3.064.942 .000						1,03 20,11 % %	2.854.42 0.170	DPRK P
	1	0	0	2.			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	-	95 %	95 %	2.053.225.100	3.058.478 .800	3.064.942 .000						72,92 %	2.854.42 0.170	DPRK P

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas					
										Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al	Daera h	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0 4	0 4	2. 01	00 01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		108 Unit Rumah	108 Unit Rumah	2.053.225.100	3.058.478 .800	3.064.942 .000	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Inse ntif Fisk al	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa san Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	105 Unit Rumah	2.854.42 0.170	DPRK P
5	1	0 4	0 5				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		66 %	87 86 % %	795.195.000	1.395.195 .000	1.385.709 .602						87 86 % %	2.054.48 6.465	DPRK P
	1	0 4	0 5	2. 01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	-	17475 meter 22123 meter	17475 meter 22123 meter	795.195.000	1.395.195 .000	1.385.709 .602						17475 meter 22123 meter	2.054.48 6.465	DPRK P

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penan ggung Jawab	
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelu m	Sesuda h	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasion al					Daera h
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		4 Lokasi	4 Lokasi	790.425.000	1.390.425 .000	1.380.939 .602	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	4 Lokasi	1.929.11 4.000	DPRK P
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		4 Lapora n	4 Lapora n	4.770.000	4.770.000	4.770.000	Kota Blitar, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasi l	Mempe rkuat infrastr uktur untuk ekono mi dan pelaya nan dasar	Penin gkata n Kualit as Infrast ruktur yang Berwa wasan Lingk ungan Hidup	Masyar akat Kota Blitar	4 Lapora n	125.372. 465	DPRK P
	J U M L A H										10.381.7 35.750	12.313.87 5.750	12.313.87 5.631							24.461.6 11.084	

Dengan fokus pada :

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infratraktur permukiman terutama jalan dan drainase lingkungan serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta
2. Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan fisik konstruksi di perumahan dan kawasan permukiman yang tertunda/terkena refocussing pada penganggaran tahun berikutnya
3. Adanya sosialisasi peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
4. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - o melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.